

Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat Nahdatul Ulama Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara

Ahmad Aufa Zainal¹, Nur Aliyah Zainal², Febrianto Syam¹

¹Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

²Program Studi Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang polarisasi dukungan politik dan bentuk dukungan politik Muslimat dan Fatayat kepada Indah Putri Indriani-Thahar Rum pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dengan informan yang meliputi elit Muslimat dan Fatayat Luwu Utara beserta anggota yang ditentukan dengan menggunakan teknik sampling purposive. Adapun teori yang digunakan adalah teori gender, teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional (rational choice). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat polarisasi dukungan politik yang diberikan kepada Indah Putri Indriani-Thahar Rum oleh Muslimat dan Fatayat. Secara umum dipermukaan dukungan politik yang diberikan kedua organisasi tersebut hanyalah semu sebab terdapat kepentingan politik yang berbeda antara keduanya. Muslimat secara tegas memberikan dukungan politik sedangkan Fatayat hanya nampak dipermukaan saja sebab ada kekhawatiran yang dirasakan yakni berkaitan dengan citra dan netralitas para pengurus dan anggota dari Fatayat itu sendiri.

Kata Kunci :

Polarisasi Politik, Muslimat dan Fatayat, Pilkada Serentak, Luwu Utara

PENDAHULUAN

Sejarah panjang telah mencatat perjuangan kaum perempuan untuk melawan dominasi kaum laki-laki disetiap sektor kehidupan. Pada pertengahan abad ke-18, sekelompok pemikir internasional yang tercerahkan mulai menantang tirani dari masyarakat feodal yang didasarkan pada hak-hak istimewa turunan yang dimiliki oleh raja-raja, Gereja dan bangsawan. Kritikus tercerahkan ini memunculkan hak-hak manusia sebagai tantangan terhadap hak Ketuhanan milik para raja. Mereka menyuarakan ketidakpuasan dari suatu kelas menengah baru yang menginginkan kemajuan dan sudah bosan dengan ketaksetaraan yang ada dalam hirarki feodal yang lama, kaku, dan korup. Di tengah-tengah benih perubahan sosial itu, kaum perempuan mulai memunculkan persoalan tentang ketidaksetaraan yang mereka alami dan mulai menantang tirani laki-laki dalam rumah tangga.¹

Proses panjang perjuangan kaum perempuan di seluruh dunia patut diapresiasi sebagai suatu bentuk perlawanan atas ketidakadilan dalam peran sosial kemasyarakatan tidak mesti seluruhnya dikendalikan oleh kaum laki-laki begitu pula di NU. Kemunculan perempuan NU merupakan transmisi pemikiran dalam tubuh NU yang melihat perempuan sebagai bagian yang perlu untuk dipertimbangkan keberadaannya. Perempuan NU adalah individu yang memiliki hubungan secara langsung (gerakan dan ideologi) dengan Nahdatul Ulama (NU) yang kemudian membentuk organisasi keperempuanan dibawah naungan NU. Adapun organisasi keperempuanan NU yaitu Muslimat NU, Fatayat dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU).

Keterpilihan Indah Putri Indriani sebagai Bupati Luwu Utara tidak terlepas dari peran Muslimat dan Fatayat sebagai organisasi keperempuanan yang berasal dari NU. Namun, dibalik semua itu ternyata dukungan tersebut hanyalah nampak dipermukaan saja sebab pada kenyataannya beberapa anggota Muslimat dan Fatayat secara pribadi tidak memberikan suaranya kepada Indah Putri Indriani.

¹ Susan Alice Watkins, Martha Rodrigues dan Marisa Rueda, *Feminisme Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007), h. 10.

Kemunculan kaum perempuan pada kontestasi politik Luwu Utara memiliki makna tersendiri bagi perempuan NU yaitu kaum perempuan secara politik telah terwakilkan dengan adanya calon dari kaum perempuan. Untuk itu dalam perspektif gender, Muslimat dan Fatayat sebagai organisasi perempuan NU melihat bahwa kaum perempuan memiliki afiliasi tersendiri dan tidak dapat dipungkiri mengingat kaum perempuan harus memiliki wakil pada taraf eksekutif di suatu daerah sehingga apa yang selama ini menjadi anomali terhadap pola patriarki yang dialami oleh NU pada saat pertama kali terbentuk tidak lagi terjadi dan dialami oleh perempuan NU pada wilayah di luar dari NU itu sendiri.

Untuk memahami sikap politik (polarisasi) Muslimat dan Fatayat di Luwu Utara, maka studi ini memiliki misi utama untuk menjawab pertanyaan umum, yakni bagaimana polarisasi pilihan politik Muslimat dan Fatayat pada Pilkada Serentak tahun 2015 di Luwu Utara dan bagaimana bentuk dukungan kedua organisasi tersebut?.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum menjelaskan lebih jauh bagaimana polarisasi dukungan politik Muslimat dan Fatayat di Luwu Utara, berikut ini dipaparkan studi-studi terdahulu yang dapat membantu dalam memetakan hal-hal apa yang sudah dan belum dibidik oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang diangkat peneliti, yakni:

Nurlira Goncing menulis tentang *“Perilaku Elit Politik Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru Di Kota Makassar”*. Goncing memfokuskan pokok permasalahannya pada perilaku elit politik NU pasca Orde Baru di Makassar serta motif yang melatarbelakanginya.² Sementara itu, Nusrokh Diana menulis tentang *“Kelahiran Muslimat NU”*. Kajian ini difokuskan pada proses historis lahirnya Muslimat NU pada rentang waktu 1938-1952 M. Lebih khusus membahas mengenai upaya perempuan NU dalam mendirikan Muslimat di setiap acara Kongres NU. Kajian ini juga berusaha menganalisis apa yang melatarbelakangi bangkitnya perempuan NU untuk mendirikan organisasi

perempuan di dalam organisasi tradisional tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya Muslimat NU, saat itu bernama Nahdlatul Ulama Moeslimat (NOM) merupakan sebuah kebangkitan perempuan NU, yang dilatarbelakangi oleh situasi sosial saat itu. Pernyataan ini didasarkan pada kegigihan para perempuan NU yang memerlukan waktu cukup lama dalam upaya membentuk wadah bagi mereka. Upaya untuk membentuk wadah bagi perempuan NU telah ditandai dengan hadirnya Ny. Djunaisih dan Ny. Siti Syarah yang merintis berdirinya Muslimat NU dengan mengeluarkan gagasannya di forum resmi NU, yakni pada acara Kongres NU ke-13 di Menes tahun 1938.³

Ahmad Ni’am Shidqi menulis tentang *“Gerakan Pengarusutamaan Gender Fatayat NU Cabang Jepara Jawa Tengah (2000-2007)”*. Lokus penelitian ini lebih spesifik dan bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah gerakan perempuan yang diperankan oleh Fatayat. Hasil dari penelitian ini yaitu deskripsi mengenai upaya dan peran Fatayat dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas anggotanya melalui pelatihan-pelatihan dalam organisasi dan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat sebagai wujud nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Sementara Mami Hajaroh menulis tentang *“Divisi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Mami Hajaroh menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Subyek penelitian adalah anggota Fatayat yang duduk dalam kepengurusan Fatayat di tingkat cabang, wilayah dan pusat periode tahun 1995-2000, 2000-2005, dan 2005-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa difusi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Fatayat terjadi pada dua level yakni individu dan organisasi. Model konseptual difusi kebijakan pada individu ditemukan dengan tahap pengetahuan, persuasi, konfirmasi, keputusan dan implementasi.⁵

³ Nusrokh Diana, “Kelahiran Muslimat NU”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2015), h. vii.

⁴ Ahmad Ni’am Shidqi, “Gerakan Pengarusutamaan Gender Fatayat NU Cabang Jepara Jawa Tengah (2000-2007)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), h. vii.

⁵ Mami Hajaroh, “Divisi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. iii.

² Nurlira Goncing, “Perilaku Elit Politik Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru Di Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2013), h. x.

Selain keempat karya di atas, ada dua karya yang membincang tentang politik perempuan dan lokusnya di Makassar. Sri Sumarni Sjahril dalam tulisannya menjelaskan tentang “*Politik Perempuan Di Kota Makassar*” dan secara khusus membincang tentang peran politik perempuan Partai Nasdem Kota Makassar. Hasil dari penelitiannya menggambarkan perempuan Nasdem memiliki peran sangat penting di masyarakat dalam hal memberikan pendidikan politik terhadap anak muda, selain itu hadirnya perempuan di legislatif bukan hanya ajang untuk merebut kekuasaan, namun bagaimana kekuasaan ini dimaknai sebagai perjuangan untuk memberikan posisi tawar kepada masyarakat marginal. Itu dibuktikan dengan dirancangnya sebuah peraturan daerah mengenai air susu eksklusif dan salah satu pengusungnya ialah kader Partai Nasdem.⁶ Jika Sri Sumarni Sjahril menjelaskan tentang peran perempuan Nasdem, lain halnya dengan Ririn Ramdani yang menulis tentang “*Perempuan, Politik, Dan Parlemen Di Kota Makassar*”. Ririn menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pemenuhan kuota perempuan di parlemen Kota Makassar.⁷

Dari pemaparan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pembeda dalam studi ini adalah penulis lebih fokus pada polarisasi yang terjadi antar Muslimat dan Fatayat pada Pilkada Serentak tahun 2015 di Luwu Utara pada Indah Putri Indriani-Thahar Rum. Sekalipun kedua organisasi perempuan ini berada dalam naungan yang sama yaitu NU namun terdapat cara bertindak yang berbeda pada kontestasi politik yang terjadi.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Gender

Secara terminologi gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata jender dan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis

yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin laki-laki identik dengan otonom, independen, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, sementara perempuan identik dengan keterikatan, dependen, berkorban, pengasuh anak, dan segala hal yang berkaitan dengan kelemahan lembut. Istilah jender terkadang disamakan dengan perempuan, penyamaan antara jender dan perempuan disebabkan oleh keadaan yang paling banyak menyuarakan kepentingan perempuan adalah kaum perempuan.⁸

Ketidakeimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan. Merupakan kesenjangan terhadap hak-hak manusia yang dikenal dengan kesenjangan gender.⁹

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.¹⁰ Pembentukan gender yang dialami oleh laki-laki dan perempuan banyak sedikit ditentukan oleh beberapa faktor yang ikut membentuknya, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) antara laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik cenderung tidak dapat melakukan hal yang produktif, tidak dapat menghasilkan uang, tidak memiliki kekuasaan, dan pengaruh sehingga peran ini lebih banyak diserahkan kepada kaum perempuan, sedangkan peran publik yang cenderung menghasilkan uang, memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja yang tidak seimbang ini kemudian melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan.

⁶ Sri Sumarni Sjahril, “Politik Perempuan Di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Partai Nasdem Kota Makassar)”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2016), h. x.

⁷ Ririn Ramdani, “Perempuan, Politik Dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2016), h. vii.

⁸ Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Lab. Ilmu Politik UINAM, 2015), h. 211-212.

⁹ Akhmad Dani dan Siti Hadilang, *Penganggaran Pro Poor dan Responsif Gender Cerita Sukses dari Sinjai dan Luwu Timur*, (Makassar: Komite Pemantau Legislatif, 2014), h. 22.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 31.

Perbedaan secara kodrati antara kaum laki-laki dan kaum perempuan merupakan perbedaan yang secara langsung diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan yang memiliki ciri atau karakteristik dari kedua kaum tersebut yaitu jenis kelamin (seks). Untuk lebih memperjelas konsep jenis kelamin (seks) dan konsep gender berikut akan dikemukakan secara ringkas mengenai hal tersebut. Unsur yang menjadi pembeda seks adalah alat reproduksi yang dimiliki (biologis) sedangkan unsurpembeda dari gender adalah kebudayaan, seks bersifat kodrati yaitu diberikan secara langsung oleh Tuhan dan tidak dapat dipertukarkan sedangkan sifat gender yaitu harkat, martabat yang dapat dipertukarkan, sumber pemberian seks bersumber dari Tuhan sedangkan gender bersumber dari manusia (masyarakat) yang memberikan label (labeling), dan keberlakuan seks berlaku sepanjang masa serta dimana saja sedangkan keberlakuan gender dapat berubah sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh masyarakat.

Konsep gender ini merupakan suatu konsep yang mencoba untuk menempatkan individu baik laki-laki maupun perempuan pada wilayah publik dan domestik tanpa adanya sekat primordial yaitu jenis kelamin (seks) sebagai unsur pembeda dalam mengerjakan pekerjaan yang masing-masing jenis kelamin tersebut dapat mengerjakannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta pengetahuan pada bidang tersebut.

Teori ini digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Muslimat dan Fatayat merupakan organisasi otonom NU yang mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap pola patriarki. Dalam konteks politik khususnya di Luwu Utara, kedua organisasi otonom NU ini tidak tinggal diam pada momentum tersebut. Keduanya berani menunjukkan eksistensinya sebagai kaum yang dianggap marginal, tidak berdaya dan tidak dapat melakukan hal produktif namun hal tersebut dapat dibantah dengan menunjukkan peran aktif pada kontestasi pemilihan bupati tahun 2015 di Luwu Utara dengan melakukan dukungan ke calon kepala daerah saat itu. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak hanya berada pada ranah domestik saja namun dapat berada pada ruang publik sesuai dengan konsep gender.

Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan bagian yang penting dari sistem demokrasi bagi negara yang menerap

kannya. Partisipasi politik individu/ kelompok pada kegiatan atau aktivitas politik, baik itu bersifat aktif maupun pasif serta bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Budiardjo berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.¹¹

Tidak jauh berbeda dengan Budiardjo, Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.¹² Pada penjelasan yang lebih jauh lagi tentang partisipasi politik Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut; *Pertama*, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.¹³

Dalam mode partisipasi politik terdapat tata cara individu/ kelompok melakukan partisipasi politik. Mode ini terbagi menjadi dua bagian besar yaitu, *conventional* dan *unconventional*. Mode *conventional* adalah mode klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik sudah cukup lama ada, tepatnya saja tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), h. 140.

¹³ Ramlan Surbakti, h.143.

partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya gerakan sosial baru (*new social movements*). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (*environmentalist*), gerakan perempuan gelombang kedua (*feminist*), protes mahasiswa (*students protest*), dan terror.

Menurut Nimmo keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni; *Pertama*, peluang resmi. Artinya ada kesempatan seorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. *Kedua*, sumber daya sosial. Artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll. *Ketiga*, motivasi personal. Artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.¹⁴

Teori partisipasi politik digunakan untuk melihat partisipasi politik Muslimat dan dan Fatayat. Partisipasi politik memiliki beberapa kategori yang nantinya dapat dilihat Muslimat dan Fatayat masuk pada kategori seperti apa. Kategori tersebut merupakan bagian-bagian dari penjelasan teori ini yang nantinya akan dikaitkan dengan partisipasi politik Muslimat dan Fatayat pada Pilkada Serentak tahun 2015 di Luwu Utara.

Pilihan Rasional (Rational Choice)

Penjelasan teoritis tentang perilaku pemilih (*voting behavior*) didasarkan pada dua model atau pendekatan, yaitu model / pendekatan sosiologi dan model / pendekatan psikologi. Di lingkungan ilmuwan sosial Amerika Serikat, model pertama disebut sebagai mazhab Columbia (*The Columbi School of Electoral Behavior*), sementara model /pendekatan kedua disebut sebagai mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Centre*). Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, sementara mazhab kedua lebih

mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politiknya.¹⁵ Dari dua mazhab tersebut, ada mazhab ketiga yang itu sangat berpengaruh dalam perilaku memilih, yaitu mazhab di mana perilaku memilih lebih menekankan pada faktor-faktor rasionalitas.

Fokus perhatian pendekatan perilaku pemilih yang rasional terletak pada perhitungan biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Berdasarkan pendekatan pilihan rasional, yang sangat menentukan pada sebuah kegiatan politik yaitu tidak disebabkan karena adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, tetapi merupakan sebuah hasil penilaian rasional dari pemilih berdasarkan pengamatannya. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik).

Sebenarnya pendekatan pilihan rasional diadopsi dari ilmu ekonomi. Karena di dalam ilmu ekonomi menekankan modal sekecil - kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini senada dengan perilaku politik yaitu seseorang memutuskan memilih kandidat tertentu setelah mempertimbangkan untung ruginya sejauhmana program-program yang disodorkan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya, atau sebaliknya malah merugikan. Para pemilih akan cenderung memilih kandidat yang kerugiannya paling minim.

Ada faktor situasional yang ikut memengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu, para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional itu bisa berupa isu-isu politik ataupun kandidat yang dicalonkan. Perilaku pemilih tidak harus tetap atau sama, karena karakteristik sosiologis dan identifikasi partai dapat berubah-ubah sesuai waktu dan peristiwa-peristiwa politik tertentu. Dengan begitu isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih (masyarakat) dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.¹⁶

¹⁴ Alvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press Padang, 2012), h. 24.

¹⁵ Afan Gaffar, *Javaners Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h. 4-9.

¹⁶ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, (Yogyakarta, Genta Press, 2015), h. 65.

Substansi dasar dari doktrin ini telah dirumuskan oleh James B. Rule, sebagai berikut; *Pertama*, tindakan manusia (*human action*) pada dasarnya adalah instrumen agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh. Untuk manusia, atau untuk kesatuan yang lebih besar, tujuan atau nilai tersusun secara hierarkis yang mencerminkan preferensinya mengenai apa yang diinginkan atau diperlukannya. Hierarkis preferensi ini relatif stabil. *Kedua*, para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungan -nya. Informasi relevan yang dimiliki oleh aktor sangat memengaruhi hasil dari perhitungannya. *Ketiga*, proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti ratings, institusi dan praktik-praktik merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. Mungkin akibat dari pilihan kedua, pilihan ketiga, atau pilihan N perlu dilacak.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mencoba untuk melihat sebagaimana perempuan NU yaitu Muslimat dan Fatayat menggunakan rasionalitasnya dalam memilih calon Bupati saat itu sebab penekanan dari teori ini adalah menggunakan pengamatan berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh sang calon dan memiliki dampak baik atau buruk kedepannya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.¹⁸ Untuk mengumpulkan data, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang autentik. Namun demikian peneliti juga mencari data-data secara *online* untuk memperkuat hasil penelitian penulis. Adapun proses penentuan informan dilakukan dengan cara *sampling purposive*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁹

Persyaratan dalam memilih dan menentukan informan dalam penelitian ini: 1. Informan adalah

elit Muslimat dan Fatayat Luwu Utara yang secara kependudukan berdomisili di Kecamatan Masamba, Luwu Utara. 2. Informan adalah individu yang sudah memiliki hak pilih. 3. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat dijangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan informasi dan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muslimat dan Fatayat dalam Lintasan Sejarah

Nahdatul Ulama merupakan sebuah organisasi keagamaan yang berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926. Jam'iyah yang didirikan dengan nama Nahdlatul Ulama ini sejatinya memiliki citra yang membanggakan baik berskala nasional maupun internasional. Organisasi yang didirikan oleh para Ulama dan Kiai ini bertujuan untuk mempertahankan sekaligus melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah Wal-Jama'ah (Aswaja).²⁰

Didirikannya NU oleh para Ulama dan Kiai merupakan wadah yang diperuntukkan bagi pesantren. Sejak berdirinya tidak terlepas dari pola patriarki yang begitu besar saat itu. Adanya pola patriarki dalam tubuh NU terlihat begitu nyata dengan kaum laki-laki yang secara keseluruhan mendominasi di dalamnya sedangkan kaum perempuan termarginalkan dalam organisasi tersebut.

Pada perjalanan, isu perempuan semakin mendapat perhatian ketika Kiai Dahlan mengusulkan berdirinya organisasi perempuan NU pada Kongres NU ke XIII di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Kongres ini sangat penting karena mulai membicarakan tentang perlunya perempuan mendapatkan kesempatan hak untuk mendapatkan didikan agama melalui NU. Ketika itu kongres baru menyetujui perempuan untuk menjadi anggota NU yang hanya bisa menjadi pendengar dan pengikut dan tidak boleh duduk dalam kepengurusan.²¹ Pada kongres inilah terdapat beberapa catatan berkaitan tentang kiprah kaum perempuan di forum formal tersebut sehingga kongres tersebut menjadi momen tum cikal bakal lahirnya Muslimat.

¹⁷ Miriam Budiardjo, h. 93-94.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2006), h. 16.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 85.

²⁰ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012), h. 1.

²¹ Dewi Anggriani, *Perempuan Dalam Dinamika Beragama: Suatu Tinjauan Antropologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 123.

Peran Muslimat terhadap kemajuan perempuan Indonesia begitu besar. Bidang-bidang layanan yang menjadi garapannya meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam melaksanakan layanan tersebut, maka setiap kegiatan layanan tentunya merujuk pada visi dan misi Muslimat. Adapun visi Muslimat adalah terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama'ah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berke makmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah Swt.²²

Sejak kelahirannya pada tahun 1946-1952, Muslimat menjadi bagian dari NU. Dalam rentang antara 1904-1952, kegiatan NU ditandai dengan perjuangan kemerdekaan RI. Anggota-anggota NU termasuk Muslimat didalamnya mengambil peran yang cukup penting, seperti di dapur umum, Palang Merah, sebagai kurir penghubung, dan bergabung dengan pasukan-pasukan pejuangseperti Hizbullah dan Sabilillah. Pada Mukthamar NU ke-19 di Palembang, NU meningkatkan dirinya sebagai partai politik yang juga mengubah bentuk organisasi Muslimat menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru "Muslimat Nahdlatul Ulama" yang disingkat Muslimat NU. Pada Mukthamar NU ke-20 pada tahun 1954 di Surabaya diselenggarakan kongres pertama Muslimat sebagai badan otonom dari NU. Muslimat membahas berbagai masalah perempuan, antara lain masalah perkawinan dibawah umur.

Perjuangan Muslimat dalam masalah perkawinan ditunjukkan dengan mengambil peran dalam pembentukan BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Dalam kongresnya ke-7 di Jakarta pada tahun 1959, Muslimat berhasil menghilangkan tabir dari arena kongres. Keputusan pentingnya yang dicapai adalah mengajukan pernyataan kepada anggota PBNU agar anggota Muslimat dapat dicalonkan sebagai calon prioritas untuk anggota DPR, DPRD, dan Konstituante.²³

Selain Muslimat, terdapat oraganisasi perempuan NU lainnya yang diperuntukkan kepada perempuan muda NU yang disebut Fatayat. Fatayat lahir secara resmi tanggal 24 April 1950 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1317 H di Surabaya. Pada Kongres

NU ke-15, ternyata dihadiri juga oleh puteri-puteri dari berbagai cabang yang mengadakan pertemuan untuk membentuk Puteri Nahdlatul Ulama Muslimat (Puteri NUM). Di kongres mereka mengusulkan untuk diterima dan disahkan sebagai organisasi yang otonom di dalam NU, tapi kongres menyetujui Puteri NUM sebagai bagian dari NUM. Dua tahun kemudian Puteri NUM meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mempunyai pimpinan pusatnya sendiri yang terpisah dari NUM, alasannya karena di tingkat cabang organisasi Puteri NUM terus bertambah. Pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1393/ 14 Februari 21950, PBNU menyetujui pembentukan pengurus Puteri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan Fatayat NU.²⁴

Fatayat merupakan bagian dari Muslimat yang tak terlepas dari dinamika peran kaum perempuan di tubuh NU. Kemunculan Fatayat menjadi spirit baru perjuangan pemuda NU kala itu yang melihat kompetensi perempuan pada ranah publik tidak kalah saing dengan kaum laki-laki yang secara simbolis memiliki kekuasaan, kekuatan, pemberani dan lain sebagainya, berbeda dengan kaum perempuan yang tidak mampu melakukan hal yang produktif. Organisasi Fatayat bertujuan untuk terbentuknya pemuda atau wanita muda Islam yang bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlakul karimah, bermoral, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender, terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah dan tujuan NU dalam menegakkan syariat Islam.²⁵

Fatayat sebagai salah satu organisasi dibawah naungan NU yang menangani aktifitas perempuan muda keberadaannya sangat dibutuhkan, mengingat organisasi ini cukup menjadi media untuk menyosialisasikan program-programnya dikalangan generasi muda. Melihat suatu kondisi zaman modernisasi global pada saat ini, maka akan lebih baik ketika kegiatan tersebut masih dilestarikan oleh para perempuan muda, guna mengarahkan suatu kebaikan dan juga untuk menambah wawasan ilmu tentang keagamaan, memperkuat pedoman agama dalam menjalani kehidupan, sebagai pedoman untuk generasi perempuan muda dalam menyongsong masa depan. Wanita mempunyai beban yang berat, melestarikan generasi. Karena di

²² Pimpinan Pusat Muslimat NU, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, (Jakarta: PP Muslimat NU, 2009), h. 3.

²³ Khofifah Indar Parawansa, *NU, Perempuan Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional*, (Bandung: Nuansa Cendekira, 2015), h. 160.

²⁴ Dewi Anggriani, h. 125.

²⁵ Arsip Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, *Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU*, (Sidoarjo: Pimpinan Cabang, 2010), h. 11.

pundaknya terdapat kelunakan naluri, Al-Qur'an selalu menghimbau kaum wanita agar berperangai yang baik dan ikhlas dalam beramal, agar Allah senantiasa mencurahkan pertolongan kepadanya dalam melahirkan generasi baru.²⁶ Untuk itu eksistensi ilmu merupakan sarana menuju alam akhirat dan kebahagiaan ukhrawiyang juga sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah sang pencipta, sebab hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu yang disertai dengan amal-nya.²⁷

Fatayat bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan kekeluargaan, dalam hal ini pemudi Fatayat mempunyai tujuan untuk meningkatkan peranan wanita Indonesia dalam segala bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Islam telah menetapkan bahwa peran utama wanita adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, tetapi di lingkungan masyarakat, peran utama wanita ini mempunyai andil yang besar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan kualitas generasi yang baik.²⁸ Tugas dan peranan tersebut sejalan dengan kehendak Allah ketika Dia berdialog dengan para malaikat saat Dia menciptakan manusia pertama kali.²⁹

Dewasa ini perempuan NU pada wilayah publik telah mampu untuk menunjukkan perannya sebagai kaum yang tidak termarginalkan. Khusus pada wilayah politik, perempuan NU dapat dianggap memiliki peran yang besar mengingat organisasi keperempuanan NU ini, khususnya di Luwu Utara pada Pilkada Serentak tahun 2015 berperan aktif. Muslimat dan Fatayat merupakan organisasi keperempuanan yang sadar akan partisipasi politik.

1. Susunan Pengurus Muslimat Luwu Utara

Muslimat NU	
Ketua	Suparmi M. Nurul Huda
Sekretaris	Hamsatun
Bendahara	Sitti Kumayyan
Bid. Organisasi	Nurlela Toib
Bid. Dakwah	Sitti Aisyah
Bid. Pendidikan	Nur Najma

²⁶ Abu Iqbal al-Mahalli, *Muslimah Modern: Dalam Bingkai Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h.11.

²⁷ Kamil Musa, *Anak Perempuan Dalam Konsep Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1994), h. 72.

²⁸ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 130.

²⁹ Irfan Supandi, *Dahsyatnya Menjadi Ibu Rumah Tangga*, (Surakarta: Jajar Laweyan, 2011), h. 50.

Bid. LKH	Fitri Wahyuni
Bid. Ketenagakerjaan	Mania
Ketua Bid. Kesehatan	Bidan Waras

Sumber: Kantor Pimpinan Cabang Muslimat Luwu Utara

2. Susunan Pengurus Fatayat Luwu Utara

Fatayat NU	
Ketua	Nur Najmah
Wakil Ketua I	Sumami Sholeh Ahmad
Wakil Ketua II	A. Nur Aeni Middin
Sekretaris	Mania
Wakil Sekretaris	A. Etryani
Bendahara	Anna S. Yahya
Wakil Bendahara	Rosmayanti

Sumber: Kantor Pimpinan Cabang Fatayat Luwu Utara

Polarisasi Pilihan Politik Muslimat dan Fatayat

Polarisasi menurut KBBI yaitu pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Berdasarkan pengertian tersebut antar kedua organisasi NU yaitu Muslimat dan Fatayat pada Pilkada Serentak tahun 2015 yang lalu di Luwu Utara memang memberikan dukungan yang hanya nampak dipermukaan saja, bahwa dukungan tersebut tidaklah diberikan kepada Indah Putri Indriani secara keseluruhan. Ada anggota dari kedua organisasi ini yang tidak memilih Indah Putri Indriani. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Najma:

*"Yang tidak mendukung paling hanya berapa persen saja. Kita tidak bisa langsung hitung angka pastinya dan kita ketahui itu namum jumlahnya pasti sangat kecil"*³⁰

Memberikan dukungan politik memang adalah hak setiap individu, bagi organisasi yang berada dalam satu naungan yang sama bukan berarti setiap anggotanya memiliki kesamaan pilihan politik kepada calon kepala daerah. Terdapat faktor tertentu yang menyebabkan mengapa para anggota Muslimat dan Fatayat hanya menampakkan di permukaan saja dukungan tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya intervensi yang dilakukan oleh incumbent untuk memilih dirinya kembali. Intervensi tersebut dirasakan oleh pegawai Pemda Luwu Utara bahwa harus memilih

³⁰ Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.

incumbent yaitu Arifin Junaidi untuk dapat kembali menjadi Bupati Luwu Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Mania:

“Secara tidak langsung memang terdapat hal yang demikian tetapi kita juga harus pandai, tidak boleh dijadikan sebagai alat politik”³¹

Hal senada pun disampaikan oleh Ibu Nurlela: *“Yang pegawai-pegawai itu takut sama Bupati yang dulu (Arifin Junaidi) karena takut nanti dimutasi terus dipindahkan ketempat yang jauh makanya mereka yang tidak memilih Ibu Indah hanya di depan saja nampak berikan dukungan ke Ibu padahal sebenarnya tidak”³²*

Bukan berarti intervensi yang dilakukan oleh *incumbent* saat itu memberikan rasa takut kepada kaum perempuan khususnya Muslimat dan Fatayat yang berkarir di bidang Pemerintahan. Justru hal yang sangat mengejutkan terjadi yaitu kemenangan yang dirasakan oleh kaum perempuan itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh penulis ternyata perolehan suara Indah Putri Indriani sangatlah tinggi yaitu 90.824 (53,60 %) suara dibanding *incumbent* yaitu 78.614 (46,40 %) suara.

Berdasarkan data bahwa perolehan suara Indah Putri Indriani sangat jauh di atas dibandingkan Arifin Junaidi. Kekuatan *incumbent* ternyata dapat dikalahkan dengan kekuatan yang solid diberikan kepada Indah Putri Indriani. Khususnya Muslimat dan Fatayat memberikan kebaruan corak berfikir kepada masyarakat terutama dari kalangan Nahdiiyin. Ada pola yang sama dilakukan oleh kedua organisasi ini yaitu bermula dari membentuk keluarga kemudian keluar ke masyarakat menyatukan persepsi dan pemahaman berkaitan dengan pemimpin yang senantiasa berbuat untuk rakyat dan mengedepankan kepentingan bersama bukan kepentingan kelompok.

Dengan adanya pemahaman akan kedudukan perempuan di wilayah publik khususnya politik, tidak lagi perempuan menjadi *the second class* (kelas kedua) yang berada satu tingkat dibawah kaum laki-laki. Muslimat dan Fatayat telah sadar akan hal tersebut untuk itu diperlukan kedepannya komitmen dan mempersiapkan generasi yang memiliki potensi yang besar untuk menjadi

pemimpin yang berasal dari kaum perempuan lagi dan tentu mengetahui secara detail keinginan, permasalahan, dan tentu cita-cita dari kaum perempuan itu sendiri.

Bentuk Dukungan Muslimat NU

Ide bahwa politik bukan wilayah perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan stereotipe, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan diantara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan perempuan dalam kehidupan politik formal dibanyak tempat memperlihatkan gambaran yang tidak menggembarakan. Akar dari semua persoalan tersebut adalah budaya patriarkiyang menghambat semua ruang gerak perempuan disemua bidang termasuk juga dibidang politik. Dalam artian politik yang konvensional, politik hanya dilihat semata-mata sebagai kegiatan *how to exercise the power* yang membatasi lingkup aktivitas politik hanya semata-mata pada aktivitas seperti *voting* (pemungutan suara), *lobby* (lobi), *campaign* (kampanye), dan lainnya yang sejenis.³³

Namun hal tersebut justru berbanding terbalik yang ada di Luwu Utara, pasalnya kaum perempuan secara umum yang ada di daerah tersebut mampu mendobrak pola patriarki yang ada selama ini terjadi dan hal tersebut dapat terbukti dengan terpilihnya Indah Putri Indriani sebagai Bupati Luwu Utara dan membuat banyak pihak kagum sebab ini adalah kali pertamanya di Sulawesi Selatan ada Bupati yang berasal dari kaum perempuan. Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, semua pihak memiliki peran masing-masing termasuk organisasi keperempuanan yang berasal dari NU yaitu Muslimat dan Fatayat.

Sebagai individu yang memiliki hak politik untuk memilih, para anggota dari Muslimat dan Fatayat menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari partisipasi politiknya, namun tidak semua dari anggota Muslimat dan Fatayat memberikan dukungan politiknya ke Indah Putri Indriani yang disebabkan oleh faktor tertentu. Adapun bentuk

³¹ Mania (Sekertaris Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.

³² Nurlela (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.

³³ Ani Widayani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 25-26.

dukungan yang diberikan oleh Muslimat adalah sebagai berikut:

1. Kampanye Politik

Kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisir oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Mengubah sikap dan perilaku seseorang agar bisa menerima apa yang disampaikan, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah apalagi kalau ingin mengubah sikap dan kepercayaan seseorang terhadap apa yang telah diyakininya selama ini.³⁴

Di era demokrasi seperti ini, wacana kepemimpinan perempuan sepertinya sudah menemukan tempat dan peluang untuk mengambil peran. Seperti halnya Muslimat, Muslimat tidak lagi berkuat pada wilayah spiritual keagamaan saja namun lebih dari itu, di ruang publik khususnya politik Muslimat menjadi bagian di dalamnya karena peran dan posisinya. Pada Pilkada Serentak tahun 2015 yang lalu, Muslimat menjadi pioner untuk mengkampanyekan Indah Putri Indriani dan Thahar Rum untuk terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara. Organisasi otonom NU ini secara aktif mengkampanyekan pasangan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Muslimat Luwu Utara, Ibu Parmi:

“Kami semua pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan - pimpinan pengajian, pimpinan - pimpinan Yasinan, pimpinan-pimpinan tahlinan secara bersama-sama soan ke Ibu (Indah Putri Indriani) untuk mendukungnya dan siap untuk mengkampanyekan beliau dengan cara turun ke masyarakat secara langsung”³⁵

Aktifitas yang dilakukan oleh Muslimat NU dan beberapa Tokoh Agama untuk mendukung secara langsung dan siap untuk memenangkan Ibu Hj. Indah Putri Indriani merupakan bentuk partisipasi politik konvensional karena secara langsung terlibat didalamnya dan salah satu bentuk dari partisipasi politik konvensional adalah melakukan kampanye politik.

Selama menjabat sebagai Wakil Bupati hingga menjadi Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indah Putri Indriani memiliki kuasa untuk memproduksi wacana berkaitan dengan kepemimpinan kaum perempuan yang konstruktif dalam perpolitikan daerah, sehingga dengan mudah masuk ke tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya itu, Indah Putri Indriani berkomunikasi dengan baik kesemua pihak tanpa memandang latar belakang seseorang/kelompok sehingga masyarakat merasa simpati kepada beliau. Selain itu beliau juga intens bermitra dengan siapa saja termasuk dari kalangan NU dan khususnya Muslimat. Seperti yang disampaikan oleh Alwi, anggota Muslimat Luwu Utara.

“Ibu Indah itu sebelum mau menjadi Bupati memang selalu berkomunikasi dengan kita jadi dari situ kita dapat lihat bahwa kehadirannya disetiap kegaitan kami bukan semata-mata mau mencari dukungan baru datang ke kita. Jadi selama ini tidak ada perubahan terhadap Ibu Indah, justru malah lebih terbuka, cepat dilayani dan setiap diundang untuk menghadiri kegiatan keagamaan beliau selalu menyempatkan untuk hadir setiap kegiatan kita. Nah dari situ kita merasa bersimpati dengan beliau”³⁶

Hal serupa disampaikan oleh Indarwati: *“Ibu Indah itu sebelum Pilkada memang sangat rajin komunikasi dengan kita. Istimewahnya Ibu itu biar malam dan Ibu sudah tidur tapi kalau kita (Muslimat) yang datang mau bertemu langsung itu dia terima kami. Bahkan setelah Pilkada lebih bagus Ibu itu tidak ada yang beda. Makanya kami rela untuk mengkampanyekan”³⁷*

Seperti yang disampaikan oleh Alwi dan Indarwati sebenarnya merupakan apresiasi yang diberikan kepada Indah Putri Indriani sebab beliau memang memiliki ketulusan untuk bekerja terhadap masyarakat yang ada di Luwu Utara. Muslimat yang seluruhnya adalah kaum perempuan, dapat menjadi kekuatan bagi kaumnya sendiri dan untuk kemajuan kaumnya sendiri selama mampu untuk tetap solid disetiap keadaan. Solidaritas antara wanita bisa menjadi daya pengubah yang kuat dan dapat mempengaruhi perkembangan hari esok dengan cara yang menguntungkan, tidak hanya bagi wanita tapi juga bagi laki-laki. Namun, solidaritas semacam ini harus digalang di atas dasar pemahaman yang jelas tentang apa yang tengah

³⁴ Ibnu Hajar, h. 26.

³⁵ Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.

³⁶ Alwi (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.

³⁷ Indarwati (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.

berlangsung di negara-negara miskin agar tidak dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain yang secara diametrik berlawanan dengan makna keadilan dan kemerdekaan bagi semua orang.³⁸

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya antara laki-laki dan perempuan hanya memiliki perbedaan kodrati saja yaitu hanya perbedaan jenis kelamin, tetapi tidak memiliki perbedaan terhadap kedudukan didalam struktur sosial. Perempuan yang ingin berkiprah di lingkungan publik, masih sulit melepaskan diri dari tanggungjawab di lingkungan domestik. Perempuan dalam hal ini kurang berdaya untuk menghindari dari beban ganda tersebut karena tugasnya sebagai pengasuh anak sudah merupakan persepsi budaya secara umum. Kontrol budaya agaknya lebih ketat kepada perempuan dari pada laki-laki.³⁹ Namun, dengan adanya gelar pendidikan yang dinobatkan kepada seorang perempuan yang memberikan tanda bahwa seseorang tersebut merupakan suatu ikhtiar untuk melakukan perlawanan kepada kaum laki-laki yang selama ini mendominasi disemua sektor termasuk wilayah politik.

Indah Putri Indriani mampu untuk membuktikan bahwa kaum perempuan tidak selamanya harus berada di wilayah domestik saja dan juga tidak harus dimarginalkan. Kaum perempuan juga berhak untuk berpendidikan tinggi seperti Indah Putri Indriani ini. Selain itu, Indah Putri Indriani ini yang pernah menjadi Dosen Pascasarjana UI juga berjanji akan memberikan jaminan beasiswa dari SD hingga SMA bagi warganya, agar masyarakat Luwu Utara menjadi tercerahkan dengan pendidikan yang layak di Luwu Utara.⁴⁰ Hal ini tentu bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi selanjutnya untuk berbuat yang terbaik untuk negeri sendiri tanpa ada jenis kelamin yang harus terdiskriminatifkan. Antara laki-laki dan perempuan sama kedudukannya, keduanya berhak untuk menjadi siapa saja di wilayah publik.

Selain itu untuk menunjang aktifitas dalam proses berkampanye, Muslimat senantiasa menghaturkan do'a kepada Indah Putri Indriani dan Thahar Rum. Secara sederhana do'a merupakan wujud penyadaran atas diri yang tidak mempunyai daya dan upaya

terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan ini, setiap manusia senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Swt. guna tujuan tertentu. Di kalangan awam, do'a terhaturkan apabila seseorang/kelompok berada dalam keadaan cemas terhadap keadaan fana' (kehancuran). Namun apabila do'a terhaturkan dan terpancar keyakinan bahwa Yang Maha Esa dan Maha Benar itu pasti ada, maka Allah Swt. mengabulkan permintaan hambanya yang benar-benar bertaqwa kepada-Nya.

Hal inilah yang menjadi bekal Muslimat Luwu Utara untuk mendukung Indah Putri Indriani pada Pilkada Serentak tahun 2015 yang lalu. Melalui do'a pula, Muslimat mendeklarasikan diri untuk mendukung beliau sebagai calon Bupati Luwu Utara periode 2016-2021. Hampir disetiap kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat Luwu Utara mereka menyempatkan untuk mendo'akan beliau ataupun ketika bertemu secara langsung. Hal ini pun diperjelas oleh Ketua Muslimat Luwu Utara yang pernyataannya sebagai berikut:

*"Saya sampaikan ke Ibu (Hj. Indah Putri Indriani). Ibu hati saja yang diukur, kalau ibu ingin mencalonkan diri dan mau membantu NU InsyaAllah kita do'akan, kita hanya menawarkan do'a saja kepada Ibu (Hj. Indah Putri Indriani) sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah Swt Bu yang penting Ibu mau duludan kita akan bantu"*⁴¹

Dukungan yang dilakukan oleh Muslimat dalam bentuk do'a merupakan upaya untuk mendapat pemimpin yang arif, bijak dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu. Indah Putri Indriani dirasa pantas untuk menjadi Bupati sebab beliau merupakan sosok yang dapat mengakomodir semua kepentingan, merakyat, dapat merangkul semua dan tidak diskriminatif terhadap orang/kelompok apalagi diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu. Berbeda dengan Bupati yang sebelumnya menjabat yaitu Arifin Junaidi yang oleh orang-orang Muslimat Luwu Utara merasa kecewa terhadap kepemimpinannya. Seperti yang disampaikan oleh Nurlela, anggota Muslimat:

"Karena Pak Bupati yang dulu (Arifin Junaidi) tidak begitu perhatian/dekat sama kita (Muslimat) bahkan kami tidak pernah ketemu secara langsung. Kita undang dia dipengajian NU datangnya terlambat sampai kacau kegiatan tersebut, karna

³⁸ Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Terj. Zuhilmiyasari Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. XXI.

³⁹ Nasaruddin Umar, h. 76

⁴⁰ <https://news.detik.com/berita/3144812/indah-putri-indriani-bupati-perempuan-pertama-di-sulsel> (Diakses Pada 19 November 2017 Pukul 19.25 WITA)

⁴¹ Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.

*acaranya tidak boleh dimulai kalau Pak Bupatinya belum datang. Beda sama Ibu (Indah Putri Indriani) dia itu merakyat, merangkul semua, tidak pilih-pilih. Walaupun sama orang kecil dia itu sapu rata malah mengayomi semua beda sama Bupati yang dulu jaga jarak dia*⁴²

Itulah sebabnya mengapa anggota dan pengurus Muslimat mendoakan Indah Putri Indriani untuk dapat menjadi Bupati Luwu Utara. Melalui do'a seluruh anggota dan pengurus Muslimat mendukung secara penuh Indah Putri Indriani. Do'a yang ditawarkan pun merupakan do'a yang tidak hanya berasal dari Muslimat saja melainkan ada juga dari kalangan Ulama, Tokoh NU dan pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang bukan hanya berasal dari Luwu Utara saja namun ada juga para ustadz-ustadz yang berasal dari luar Luwu Utara seperti Ustadz Sirkinwanto dari Makassar dan Ustadz Hafid dari Takar. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar peduli terhadap masalah yang ada di daerah ini, bukan hanya sekedar pencitra politik yang dibangun.

2. Kontrak Politik Muslimat - Indah Putri Indriani
Dukungan Muslimat Luwu Utara terhadap Indah Putri Indriani selain melakukan aktifitas kampanye, mendeklarasikan diri melalui do'a yang diperuntukkan kepada Indah Putri Indriani, juga terdapat kontrak yang dilakukan antara Muslimat dan Indah Putri Indriani. Sebagai organisasi keagamaan yang visinya adalah terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama'ah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah Swt. Sudah sepatutnya hal tersebut harus dilaksanakan bukan hanya di lingkungan NU saja tetapi harus juga dirasakan oleh orang lain dan bukan hanya kaum perempuan saja tetapi harus dirasakan juga oleh kaum laki-laki agar visi tersebut dapat tercapai sesuai dengan keinginan dan kesepakatan Muslimat secara nasional.

Visi yang ditawarkan oleh Indah Putri Indriani dan Thahar Rum adalah Luwu Utara yang religius dengan pembangunan berkualitas dan merata yang berlandaskan kearifan lokal.⁴³ Tujuan visi tersebut yaitu untuk menanamkan kesadaran beragama dalam kehidupan sosial yang ada di Luwu Utara.

⁴² Nurlela (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2016).

⁴³ <https://luwuutarakab.go.id/page/3/visi-dan-misi.html> (Diakses Pada 19 November 2017 Pukul 19.59 WITA)

Dalam program religius yang dirintis oleh Putri Indriani ini diantaranya adalah shalat subuh secara berjamaah, program T10 atau tauziah keagamaan 10 menit dan program pengajian bulanan yang tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai Pemda saja namun program pengajian bulanan ini juga diperuntukkan kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, ada permintaan dari Muslimat kepada Indah Putri Indriani ketika saat itu menjadi calon Bupati yaitu membantu program Muslimat untuk mensukseskannya. Hal tersebut didasarkan pada permasalahan ummat khususnya dari kalangan NU di daerah yang perlu perhatian besar Pemda sebab otoritas organisasi tidak dapat menyelesaikannya karena keterbatasan pendanaan. Adapun yang menjadi kontrak politik Muslimat dan Indah Putri Indriani adalah pengajian bulanan yang intens dilakukan, santunan anak yatim dan lansia, kesejahteraan guru TPA/TPQ dan menghadiri hari besar NU.

Muslimat menawarkan beberapa poin yang disampaikan kepada Indah Putri Indriani untuk dijadikan sebagai kontrak politik antar keduanya. Secara umum program yang ditawarkan oleh Indah Putri Indriani memang sejalan dengan kebutuhan Muslimat namun ada hal yang lain juga perlu untuk diperhatikan. Seperti yang disampaikan oleh Parmi sebagai berikut:

*"Kita cari program-program kandidat yang sama dengan program kita (Muslimat) dan mengeti permasalahan. Program-program yang Ibu tawarkan sejalan dengan Muslimat. Tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan organisator tapi secara ummat karena Muslimat tidak terlepas dari ummat"*⁴⁴

Program religius tersebut merupakan program yang bukan untuk kepentingan Muslimat semata melainkan untuk kesejahteraan ummat khususnya orang-orang NU yang membutuhkan banyak perhatian Pemerintah Daerah.

Bentuk Dukungan Fatayat NU

Secara organisasi Muslimat dan Fatayat merupakan organisasi yang berada dalam naungan yang sama yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Kedua organisasi keperempuanan NU ini memiliki aturan tersendiri didalamnya. Organisasi Fatayat merupakan organisasi perempuan muda, yang dimana lingkungan aktifitasnya adalah tentang keagamaan.

⁴⁴ Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.

Dalam organisasi ini perempuan berperan untuk memperjuangkan agama dan membangun kualitas generasi pemudi yang berpedoman pada Al-Qur'an.⁴⁵

Tugas untuk memperjuangkan agama dan pembangunan generasi pemudi Fatayat merupakan suatu jalan untuk memberikan kesempatan kepada pemudi Fatayat untuk berkesempatan dalam menjalankan perintah Allah Swt. Hal tersebut sesuai dengan tugas manusia yaitu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah terjadinya kemungkaran di muka bumi ini. Hal inilah yang juga memotivasi pemudi Fatayat Luwu Utara untuk turut serta dalam agenda melaksanakan perintah Allah Swt., berperan aktif dalam masyarakat, dan juga mendukung Pemerintah Luwu Utara dalam mencapai programnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Fatayat pada Pilkada tahun 2015 yang lalu adalah melakukan mobilisasi kader Fatayat. Hal ini merupakan suatu bentuk dukungan terhadap Indah Putri Indriani yang diberikan oleh Fatayat.

1. Mobilisasi Kader Fatayat

Fatayat berkeinginan kaum perempuan untuk berkiprah secara leluasa di ruang publik apalagi dengan adanya gender membuat pemahaman kita akan kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama perannya. Dengan melakukan mobilisasi kader Fatayat dapat memberikan dukungan kepada Indah Putri Indriani. Inilah yang ditegaskan oleh Najma.

*"Dengan adanya gender tidak ada lagi pengklasifikasian antarlaki-laki dan perempuan, keduanya bebas untuk berkiprah didunia apa saja termasuk dunia politik. Saya secara pribadi memberikan himbauan kepada kader untuk memilih calon yang memiliki kesamaan dengan kitanamun kembali lagi ke kader mau memilih siapa karena itu hak mereka"*⁴⁶

Terjadinya suatu proses transformasi menandakan suatu keadaan yang harus dirubah. Transformasi sekaligus mencakup tiga unsur dalam prosesnya yaitu perbedaan, adanya identitas tertentu, dan

bersifat historis yang terikat pada konteks.⁴⁷ Transformasi sosial merupakan perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Oleh karena itu, transformasi merupakan suatu proses perubahan atau pembaharuan cara, bentuk, model, strategi maupun pendekatan dalam lingkup waktu tertentu. Sejalan dengan hal diatas, Fatayat sadar akan posisi mereka sebagai perempuan dan peran mereka di ruang publik termasuk dunia politik. Sesuai dengan penjelasan Darmini sebagai berikut:

*"Kita setuju kaum perempuan untuk berkiprah dimana saja. Kita sebagai perempuan harus memperjuangkan cita-cita kami sebagai perempuan. Kami tidak mau kalah saing dengan laki-laki. Ibu Indah sebagai perempuan setidaknya dapat mewakili kami ditambah program-program yang ditawarkan"*⁴⁸

Hal yang senada pun disampaikan oleh Sumri:

*"Sebagai perempuan kita harusnya bangga karena mengemban beban ganda. Untuk itu kita sebagai perempuan harus maju dan turut serta dalam pemberdayaan perempuan dimana saja"*⁴⁹

Keterpilihan Indah Putri Indriani sebagai Bupati Luwu Utara memang tidaklah terlepas dari peran Muslimat dan Fataya. Namun, dibalik semua itu ternyata dukungan tersebut hanyalah nampak dipermukaan saja sebab pada kenyataannya beberapa anggota Muslimat dan Fatayat secara pribadi tidak memberikan suaranya pada Indah Putri Indriani. Bukan berarti dengan adanya calon Bupati dari kaum perempuan saat itu semua perempuan memilih yang berasal dari kaumnya juga. Hal tersebut terbukti bahwa tidak semua kaum perempuan memilih Indah Putri Indriani yang disebabkan oleh beberapa faktor satu diantaranya adalah ketakutan yang dirasakan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) sebab saat itu sudah ada penegasan bahwa harus memilih *incumbent* pada Pilkada 2015 yang lalu. Akan tetapi persentasenya sangat minim sebab para anggota Muslimat dan Fatayat sudah membulatkan tekad agar memiliki pemimpin yang berasal dari kaum perempuan, mengerti permasalahan perempuan dan memiliki kesamaan program dengan Muslimat dan Fatayat.

⁴⁵ Elis Erviana, "Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013", *Jurnal Genta*, Vol.II No. 2, (September 2014), h. 290.

⁴⁶ Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.

⁴⁷ Zaeny, *Gerakan Keagamaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), h. 12.

⁴⁸ Darmini (Anggota Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 28 September 2017.

⁴⁹ Sumri (Anggota Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 28 September 2017.

2. Mendukung Program Indah Putri Indriani

Fatayat mencoba untuk turut serta melakukan upaya agar pengembangan agama di dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu cara yang dilakukan oleh Fatayat adalah mendukung program religius dan pengembangan kaum perempuan yang ditawarkan oleh Indah Putri Indriani dan Thahar Rum pada Pilkada tahun 2015 yang lalu. Hal ini merupakan bentuk dukungan agar ajaran agama di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai perintah Allah Swt.

Sebagaimana yang disampaikan Ketua Fatayat: *"Sejalan dengan cita-cita Fatayat, Ibu Indah memiliki kesamaan dengan kita (Fatayat), dimana Visi Ibu yaitu mewujudkan Luwu Utara yang religius karna itu kita juga mau melihat nilai-nilai keagamaan itu lahir di Luwu Utara jadi otomatis sangat sejalan dengan dengan kita agar syiar-syiar agama itu nampak"*⁵⁰

Di bidang pemberdayaan ekonomi, salah satu upaya Indah adalah pelatihan bagi kaum perempuan. Sebagai langkah awal untuk menunjang itu semua Pemerintah Daerah memberikan dana hibah kepada seluruh organisasi yang ada di Luwu Utara yang tujuannya untuk peningkatan produktivitas organisasi dan masyarakat yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Najma:

*"Kami diberikan dana hibah untuk pengembangan organisasi. Pemberian dana tersebut agar organisasi bisa hidup dan kita semakin kuat. Jika organisasi berkembang maka sampai ke akar rumput semua menjadi kuat (tingkat Dusun) dan tentu ini membuat kami semakin semangat"*⁵¹

PENUTUP

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, antar kedua organisasi NU yaitu Muslimat dan Fatayat pada Pilkada Serentak tahun 2015 yang lalu di Luwu Utara memang memberikan dukungan yang hanya nampak dipermukaan saja, bahwa dukungan tersebut tidaklah diberikan kepada Indah Putri Indriani secara keseluruhan. Ada anggota dari kedua organisasi ini yang tidak memilih Indah Putri

Indriani. Muslimat secara tegas memberikan dukungan sedangkan Fatayat ragu untuk memberikan dukungan. Memberikan dukungan politik memang adalah hak setiap individu, bagi organisasi yang berada dalam satu naungan yang sama bukan berarti setiap anggotanya memiliki kesamaan pilihan politik kepada calon kepala Daerah.

Kedua, Muslimat dan Fatayat mencoba untuk melakukan proses untuk mengembangkan anggotanya dengan tidak buta terhadap politik. Salah satu caranya adalah dengan memberikan dukungan kepada Indah Putri Indriani. Adapaun bentuk dukungan yang diberikan oleh Muslimat adalah dengan melakukan kampanye politik serta mendo'akan Indah Putri Indriani agar menjadi Bupati Luwu Utara. Selain itu bentuk dukungan lainnya yaitu dengan mengadakan kontrak politik berupa pengajian bulanan, kesejahteraan guru TPA/TPQ, santunan anak yatim dan lansia, serta senantiasa hadir disetiap hari besar NU dan Muslimat. Tidak jauh berbeda dengan Muslimat, Fatayat yang di dalamnya adalah para pemuda NU juga melakukan hal yang sama dengan cara memobilisasi kader Fatayat dan memberikan dukungan kepada Indah Putri Indriani karena adanya kesamaan visi dan program untuk pengembangan kaum perempuan khususnya di Luwu Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Iqbal al-Mahalli, *Muslimah Modern: Dalam Bingkai Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000).
- Afan Gaffar, *Javaners Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992).
- Ahmad Ni'am Shidqi, "Gerakan Pengarusutamaan Gender Fatayat NU Cabang Jepara Jawa Tengah (2000-2007)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).
- Akhmad Dani dan Siti Hadilang, *Penganggaran Pro Poor dan Responsif Gender Cerita Sukses dari Sinjai dan Luwu Timur*, (Makassar: Komite Pemantau Legislatif, 2014).

⁵⁰ Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.

⁵¹ Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.

- Alvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press Padang, 2012).
- Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Kompas, 2005).
- Arsip Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, *Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU*, (Sidoarjo: Pimpinan Cabang, 2010).
- Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012).
- Dewi Anggriani, *Perempuan Dalam Dinamika Beragama: Suatu Tinjauan Antropologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Elis Erviana, "Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013", *Jurnal Genta*, Vol.II No. 2, (September 2014).
- Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, (Yogyakarta, Genta Press, 2015).
- Irfan Supandi, *Dahsyatnya Menjadi Ibu Rumah Tangga*, (Surakarta: Jajar Laweyan, 2011).
- Kamil Musa, *Anak Perempuan Dalam Konsep Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1994).
- Khofifah Indar Parawansa, *NU, Perempuan Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional*, (Bandung: Nuansa Cendekira, 2015).
- Mami Hajaroh, "Divisi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta", *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
- Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Terj. Zuhilmiyarsari Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Nurlira Goncing, "Perilaku Elit Politik Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru Di Kota Makassar", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2013).
- Nusrokh Diana, "Kelahiran Muslimat NU", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2015).
- Pimpinan Pusat Muslimat NU, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, (Jakarta: PP Muslimat NU, 2009).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007).
- Ririn Ramdani, "Perempuan, Politik Dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2016).
- Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Sri Sumarni Sjahril, "Politik Perempuan Di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Partai Nasdem Kota Makassar)", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2016).
- Susan Alice Watkins, Martha Rodrigues dan Marisa Rueda, *Feminisme Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007).
- Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Lab. Ilmu Politik UINAM, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Zaeny, *Gerakan Keagamaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Wawancara

Darmini (Anggota Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 28 September 2017.

Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.

Mania (Sekertaris Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.

Nurlela (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.

Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.

Alwi (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.

Indarwati (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.

Sumri (Anggota Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 28 September 2017.

Website

<https://news.detik.com/berita/3144812/indah-putri-indriani-bupati-perempuan-pertama-di-sulsel> (Diakses Pada 19 November 2017 Pukul 19.25 WITA)

<https://luwuutarakab.go.id/page/3/visi-dan-misi.html> (Diakses Pada 19 November 2017 Pukul 19.59 WITA)